

Strategi Reformasi Birokrasi Pendidikan Dan Kebijakan Kemendikbud

Murjani, Huges

Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
murjani@gmail.com

Abstrak

Melihat begitu kompleksnya permasalahan reformasi birokrasi pendidikan dan kebijakan kemendikbud terhadap mutu pendidikan, penting untuk segera dilakukan reformasi birokrasi pendidikan secara sungguh-sungguh melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kewenangan daerah untuk mengelola urusan pendidikan, dan memberikan kesempatan masing-masing satuan pendidikan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dengan cara ini, setidaknya kerancuan pandangan birokrat dimata publik dapat diminimalisir, kegiatan birokrasi pendidikan juga dapat berjalan secara efisien dan efektif. Strategi implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responibilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran eksploitasi dan kepentingan politis etis semata yang menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri.

Kata kunci; Strategi reformasi birokrasi, kebijakan pendidikan

Abstract

Seeing the complexity of the problems of reforming the education bureaucracy and the policies of the Ministry of Education and Culture on the quality of education, it is important to immediately reform the education bureaucracy in earnest through: increasing human resource capacity, increasing regional authority to manage educational affairs, and providing opportunities for each education unit to make decisions independently. In this way, at least the ambiguity of the views of bureaucrats in the eyes of the public can be minimized, educational bureaucratic activities can also run efficiently and effectively. The strategy for implementing policies and the role of the bureaucracy in education requires an educational bureaucracy that is able to adapt to the dynamics of environmental change and understand the needs of the people it serves. Bureaucratic performance through accountability must continue to be improved to create excellent service, especially responding to the public interest. Educational institutions need respect and humane treatment rather than being the target of exploitation and purely ethical political interests that negate the main goal of education itself.

Keywords; *Bureaucratic reform strategy, education policy*

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah berhasil menyusun dokumen usulan dan peta jalan (roadmap) Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019. Peta jalan tersebut mencakup delapan program area perubahan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2015—2019.

Delapan program area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud yaitu, 1) Manajemen Perubahan; 2) Penguatan Pengawasan; 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 4) Penguatan Kelembagaan; 5) Penguatan Tata Laksana; 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas: (a) Layanan Peserta Didik; (b) Layanan Satuan Pendidikan; (c) Layanan Substansi Pendidikan; (d) Layanan Guru dan Tendik; (e) Layanan Kebudayaan; (f) Layanan Kebahasaan.

Agar seluruh program area perubahan dan layanan tersebut dapat lebih efektif dan efisien, maka tiga pendekatan utama yang menjadi dasar arah kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud, yaitu 1) Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan mutu dan akses; dan 3) Pengembangan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Kemendikbud setiap tahunnya mengelola anggaran lebih dari Rp53 triliun, 16.890 pegawai, 156 satuan kerja, dengan total aset lebih dari Rp10,681 triliun. Sumber daya yang sangat besar tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban bagi organisasi. Oleh sebab itu, perlu komitmen yang tinggi dari seluruh pimpinan dan pegawai Kemendikbud untuk selalu meningkatkan kinerja dan menyukseskan Reformasi Birokrasi.

Pusat Kajian Reformasi Administrasi memandang perlu merumuskan strategi reformasi sektor pendidikan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pada sektor pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah, serta merumuskan strategi reformasi birokrasi sektor pendidikan untuk meningkatkan kinerja kebijakan pendidikan. Strategi reformasi birokrasi yang akan dirumuskan adalah strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di sektor pendidikan dari mulai struktur permasalahannya, arus utama nilai yang ingin diangkat, dan penataan birokrasinya pendidikan termasuk penataan kewenangan serta mekanisme partisipasi para pemangku kepentingan. Kajian ini diharapkan akan menghasilkan identifikasi permasalahan sektor pendidikan khususnya pendidikan dasar dan pendidikan menengah umum, serta rekomendasi kebijakan tentang strategi reformasi birokrasi sektor pendidikan untuk kinerja kebijakan pendidikan yang lebih baik (Savira, et al (2014:10)

Untuk menjamin kepastian layanan substansi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengagendakan reformasi birokrasi bidang layanan substansi pendidikan. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan substansi pendidikan yang prima sebagaimana Visi Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mencapai pelayanan prima, ditempuh melalui tiga pendekatan, yaitu: a) optimasi prosedur, b) mergerisasi dan c) penerapan teknologi. Reformasi bidang pelayanan substansi pendidikan diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk mengelola perubahan dan menciptakan budaya kinerja yang tinggi, serta mampu mempertanggungjawabkan beban pembangunan pendidikan secara akuntabel, telah disiapkan berbagai program perangkat layanan substansi pendidikan dengan menyiapkan dan mengembangkan tiga program berikut. a. Pendidikan karakter, ekonomi kreatif dan kewirausahaan; b. Sistem berbagi pengetahuan dan pengalaman (rumah belajar); c. Sistem pembelajaran dan berbagi materi yang meliputi: 1) Materi e-pembelajaran, 2) Informasi kurikulum, 3) Sistem informasi materi dan nilai ujian nasional, serta 4) Sistem informasi hasil-hasil penelitian pendidikan.

Kehadiran birokrasi sebenarnya dipergunakan untuk mengatur suatu pekerjaan yang beraneka ragam yang menyangkut kepentingan orang banyak agar bisa terlaksana dan melayani semua golongan dengan baik, efektif, dan mudah. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sampai sekarang birokrasi telah menjadi momok bagi manusia modern, yang selalu ingin dihindari dan dijauhi (Rifai, (2011:61).

Selanjutnya, menurut Benny Susanto sebagaimana dikutip Rifai (2011:65) (Dalam Fatmawati (2019:67) kebijakan pembangunan nasional secara umum adalah menyukseskan terlaksananya otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan prioritas

melanjutkan peningkatan, perluasan, pemerataan, kesempatan mendapatkan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Namun di sisi lain, penguasa lebih mengutamakan tujuan/target daripada proses. Ada kecenderungan yang beraroma politis di dalamnya. Di satu sisi, ada upaya untuk meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (guru) sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.

Peran birokrasi yang berwajah humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan diharapkan sepenuhnya berperan vital, reformis, dinamis, inovatif, aspiratif, terbuka dan bersifat mengayomi. Di sini, Kementerian Pendidikan Nasional segera mengambil sikap dengan untuk melakukan inovasi dan pemikiran, mereformasi struktur dan mekanisme birokrasi yang kondusif untuk menciptakan pendidikan yang unggul, walau memerlukan anggaran yang tidak sedikit dan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, (2008:3).

Desain penulisan yang digunakan adalah metode studi pustaka (*library research*), suatu penelitian yang didasari dengan mengumpulkan sejumlah referensi yang relevan (penilaian autentik) mengenai topik atau masalah yang menjadi objek penelitian, a. Literatur yang dijadikan bahan rujukan ialah buku, jurnal tesis, maupun dokumen peraturan pemerintah yang terkait. Referensi tersebut dikaji secara seksama untuk memperoleh penjelasan yang rinci terkait penilaian autentik di dunia pendidikan. Mengacu pada kajian tersebut, peneliti kemudian merumuskan pandangannya terhadap masalah-masalah yang terjadi pada ruang lingkup birokrasi pendidikan.

Kajian Pustaka Birokrasi

Birokrasi secara sederhana diartikan sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjalankan tugas sebagai penyedia (pelayanan) jasa kepada masyarakat. Dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta (private), maupun organisasi publik (public) termasuk organisasi pemerintahan di dalamnya terdapat organ-organ yang membentuk sebuah organisasi sehingga organisasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Nawawi, (2013-71).

Peran birokrasi dan partisipasi masyarakat sebagai kontrol pendidikan nasional merupakan fungsi birokrasi itu sendiri, mengontrol tugas pokok dan fungsi birokrasi pendidikan hingga pelaksanaan proses pendidikan di daerah supaya berjalan dengan baik. Menurut Tilaar, meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi pendidikan dapat dilakukan melalui program pembinaan birokrasi pendidikan nasional yang profesional, ini dilakukan untuk menghapus stigma bahwa birokrasi merupakan kelompok yang sangat sulit untuk berubah. Mereka cenderung menjadi orang yang konservatif dalam melaksanakan tugasnya (*business as usual*). (Tilaar,(2009:22).

Mengacu pada teori Weber, Albrow mengajukan ciri-ciri utama birokrasi ideal antara lain, yaitu: (1) adanya struktur hierarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi; (2) adanya serangkaian porsi-porsi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas; (3) adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi

dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya; (4) adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karier dengan promosi yang didasarkan atas kualifikasi dan penampilan (kinerja). (Nawawi (2013:72).

Birokrasi Pendidikan

Birokrasi pendidikan adalah penggunaan praktik-praktik birokrasi dalam pendidikan. Banyak persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan segera menjadi berlarut-larut karna rumitnya birokrasi contoh kasus tentang usulan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana serta perlengkapan –pendidikan yang diajukan oleh sekolah kepada pemerintah bahkan diajukan setiap tahun, namun tidak ada respon dan penyelesaian yang memadai dari birokrasi pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Kondisi objektif ini menunjukkan bahwa sistem sentralistik kebijakan pendidikan, penentuan alokasi anggaran yang selama ini terjadi, meskipun sudah dilakukan kebijakan desentralisasi pemerintahan, bagi sekolah pola sentralistik dari sekolah ke pemerintah –daerah masih berjalan.

PP No. 38 tahun 1992 masih berlaku hingga kini, dan dalam PP –tersebut tidak dinyatakan bahwa Kantor Departemen Pendidikan maupun Dinas Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai institusi pendidikan yang diurus atas dasar profesionalisme kependidikan, kemudian persyaratan para pimpinan : pejabatnya juga bukan berlatar belakang tenaga kependidikan.

Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi pendidikan diharapkan dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan. Namun, fakta yang berbicara adalah birokrasi selalu saja hanya sebatas propaganda yang bersifat “melayani”, memudahkan hubungan antarwarga dan hubungan warga dengan negara. Yang sungguh sangat ironis lagi, birokrasi telah menjadi alat kontrol negara serta menjadi mesin penyedot uang bagi negara dan sekelompok oknum di dalamnya, atau dengan kata lain birokrasi justru menjadi “raja zalim” yang harus selalu “diabdi dan dilayani”. Birokrasi akan berjalan efektif, jika strukturnya ramping. Namun sebaliknya, jika strukturnya gemuk, maka pelayanannya akan semakin lambat, bertele-tele dan tidak professional (azharighalib (2008).

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho (dalam Arif Rohman (2009: 120):

- a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
- b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
- c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya.
- d. Keterbukaan (openness). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat.
- e. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik.
- f. Analisis kebijakan sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik

memerlukan analisis kebijakan.

- g. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya.
- h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.
- i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas.
- j. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, dalam lembaga lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.
- k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pendidikan Nasional

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, diantaranya:

- a. Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal, meskipun sebagian pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besar di era sebelumnya. Pada masing-masing jenjang pendidikan, ada pelaku yang masih kurang kuat peran dan keterlibatannya. Sebagai contoh: dalam pendidikan dasar, peran orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja; dalam pendidikan jenjang menengah, para siswa belum menjadi subjek pendidikan atau kurang dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikan masih terlampau menekankan peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru. Selain itu, penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.
- b. Peran Pelaku Budaya belum Signifikan dalam Melestarikan Kebudayaan Ketergantungan pada peran dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah masih cukup tinggi. Inisiasi pelaku budaya masih banyak yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan kurang tersinergi. Sementara itu peran pemerintah juga belum optimal dalam upaya memberdayakan serta melibatkan para pelaku tersebut.
- c. Belum Semua Penduduk Memperoleh Layanan Akses PAUD yang Berkualitas Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD yang baru sebesar 68,1% pada tahun 2014. Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan

Standarisasi layanan PAUD.

- d. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Renstra Kemendikbud 2015—2019 yaitu Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu; Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik. Untuk mencapai misi tersebut, Kemendikbud melakukan Reformasi Birokrasi yang meliputi delapan area perubahan: 1) Manajemen Perubahan; 2) Penguatan Pengawasan; 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 4) Penguatan Kelembagaan; 5) Penguatan Tata Laksana; 6) Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas: (a) Layanan Peserta Didik; (b) Layanan Satuan Pendidikan; (c) Layanan Substansi Pendidikan; (d) Layanan Guru dan Tendik; (e) Layanan Kebudayaan; (f) Layanan Kebahasaan.

Strategi Reformasi Birokrasi Pendidikan Dan Kebijakan Kemendikbud

Birokrasi dapat dipahami sebagai prosedur kerja, sistem keorganisasian, dan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Analisis birokrasi pendidikan dapat dilakukan melalui empat pendekatan. Pertama, melalui tingkah laku para pelaku pendidikan mulai dari sekolah/UPT pendidikan, serta dinas pendidikan dan karakteristik birokrasi. Kedua, dilihat dari tingkat pelayanan dalam konsep administrasi publik (karena membahas birokrasi tidak lengkap tanpa melongok bahasan administrasi public). Ketiga, kewenangan untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri. Keempat, kualitas para birokrat bidang pendidikan. Hasil analisis birokrasi dari keempat telaah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tingkah laku para pelaku pendidikan belum menunjukkan perilaku yang baik sebagai birokrat dan didukung belum adanya sistem organisasi yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari rendahnya penyerapan anggaran secara merata, dan biasanya serapan anggaran terjadi besar-besaran terjadi pada 2 bulan terakhir pada setiap tahun sehingga hasilnya tidak efektif. Kedua, dilihat dari tingkat pelayanan para penyedia layanan pendidikan banyak sekali sikap apatis, menolak berurusan, sikap dingin, memandang rencah masyarakat, para pegawai pendidikan bekerja secara mekanis dan taat prosedur. Ketiga, lembaga pendidikan di kabupaten dan sekolah tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan pendidikan secara mandiri terutama dalam penilaian pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Keempat, kualitas birokrat pendidikan banyak yang tidak berkualitas karena pengangkatan birokrat pendidikan tidak didasarkan pada kompetensi tapi lebih banyak pertimbangan politis. Untuk memperbaiki birokrasi pendidikan maka dapat dilakukan melalui perbaikan tingkah laku karyawan, sistem dan prosedur keorganisasian, pemberian kewenangan yang lebih kepada para pelaku pendidikan, dan peningkatan kapasitas para birokrat pendidikan (Nurkolis, (2013:44).

Pada awalnya birokrasi memiliki makna positif yaitu suatu metode organisasi yang rasional dan efektif, sebagai metode untuk menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter. Namun Kini birokrasi lebih banyak memiliki makna negatif karena banyak terjadi penyimpangan dalam kekuasaan para birokrat. Bahkan Gould menyatakan bahwa birokrasi adalah makhluk yang mengerikan, mempunyai alat-alat penangkap yang senantiasa memperluas genggamannya, dan sekaligus merupakan lembaga yang paling korup dan merusak dalam masyarakat (Lubis dan Scott, (1987:83). Berangkat dari hal ini, peneliti terfokus pada masalah-masalah yang menghambat kebijakan birokrasi dalam manajemen administrasi pendidikan.

Hasil analisis birokrasi dari keempat rumusan diatas adalah sebagai berikut. Pertama, tingkah laku para pelaku pendidikan belum menunjukkan sikap kerja yang baik serta kondusif. Hal ini terbukti dengan data yang didapat pada 2 bulan terakhir pada tahun 2013,

menurunnya penyerapan anggaran secara merata dan terjadinya serapan anggaran yang membuat hasil kerja tidak efektif. Kedua, dilihat dari tingkat pelayanan para pelaku pendidikan banyak sekali sikap apatis, yang bertindak acuh tak acuh terhadap struktur administratif pendidikan. Ketiga, kualitas birokrat pendidikan banyak yang tidak berkualitas karena pengangkatan jabatan banyak dilatar belakangi oleh pertimbangan politis, dan bahkan mengesampingkan kompetensi. Ketempat, beberapa lembaga pendidikan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan tertentu secara mandiri terutama dalam pembinaan penilaian serta kebijakan pendidikan. Selain itu, tak kalah pentingnya adalah terjadi pula kendala evaluasi kebijakan Pendidikan, antara lain: 1) kendala psikologis, banyak para birokrat masih anti terhadap kegiatan evaluasi serta melakukan inovasi baru. Masih banyak yang ragu, karena takut akan kegagalan dalam mengeksplorasi perubahan baru. Evaluasi kebijakan hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan, bukan sebuah kewajiban, 2) kendala ekonomis, kegiatan evaluasi kebijakan membutuhkan biaya yang relatif besar untuk pengumpulan dan pengolahan data. Hal inilah yang dapat menghambat jalannya evaluasi karena tidak diimbangi dengan dukungan finansial, 3) kendala teknis, evaluator sering dihadapkan pada masalah kurangnya informasi yang relevan dalam memperhitungkan substansinya, 4) kurang tersedianya evaluator yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai. Kegiatan administratif hanya sebagai kegiatan formal, tapi sangat timpang dengan optimal (Maria, (2018:39).

Dampak Strategi Reformasi Birokrasi Pendidikan Dan Kebijakan Kemendikbud Terhadap Mutu Pendidikan

Menurut Zamroni (2007:204) reformasi pendidikan pada era reformasi dewasa ini secara prinsip sebenarnya mengarah pada dua sasaran penting. Pertama reformasi pendidikan diarahkan untuk memberikan tanggung jawab lebih besar kepada birokrasi di daerah untuk secara langsung menangani pendidikan, dengan memobilisasi dukungan penuh masyarakat (desentralisasi). Kedua, reformasi ditujukan untuk meningkatkan dinamika internal sekolah, dengan memberikan kesempatan lebih besar pada level sekolah: kepala sekolah, guru, orang tua siswa, staf administrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan sekolah sehari-hari (otonomi sekolah) atau disebut juga dalam wujud Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah/ harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya (Wirt & Kirst, 1982).

Sementara itu, politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21 dunia politik lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dan lebih memertingkan konstituan (kelompoknya). Platform politik bisa berubah-ubah jika rezim juga berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik, dikawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan. Tetapi, dalam kenyataan di Indonesia, apa lagi dalam era reformasi seperti saat ini, dunia pendidikan dan dunia politik saling berinteraksi dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi arena kepentingan politik, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan.

Pendidikan Indonesia dalam abad ke-21 dihadapkan pada pilihan-pilihan akibat perubahan-perubahan lingkungan strategis yang kompleks, sukar diprediksi, labil, tidak pasti, turbulen, dan keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, politik pendidikan harus hadir agar pendidikan Indonesia tidak terbawa arus perubahan lingkungan strategis yang tidak menguntungkan Indonesia. Mengingat mosaiknya tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan lingkungan strategis, maka diperlukan ketegasan arah politik pendidikan Indonesia. Berbicara politik pendidikan berarti mendekati pendidikan dengan politik sebagai takaran/tolok ukurnya. Tolok ukur politik pendidikan suatu negara sangat tergantung pada ideologi dan konstitusi suatu negara. Negara-negara barat yang berideologi

ekonomi kapitalisme dan politiknya demokrasi liberal, maka politik pendidikannya jelas mengarah kepada pembangunan generasi muda yang kapitalistik dan liberalistik (Slamet, (2014:327).

Perubahan manajemen pendidikan Indonesia sebagian besar didorong oleh semangat reformasi kekuasaan dan dilanjutkan dengan reformasi birokrasi yang terus berjalan sampai saat ini. Kebijakan manajemen pendidikan mengalami pergeseran, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Ashar (2012) menyebutkan bahwa pergeseran paradigma pengelolaan pendidikan dari sentralistik menuju manajemen desentralistik merupakan fenomena yang pernah dialami oleh sebagian besar negara-negara maju dalam mengatasi permasalahan mutu pendidikan yang dihadapinya. Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) sebagai otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, dan kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Perbaikan mutu pendidikan Indonesia memang terus dilakukan. Manajemen pendidikan di Indonesia juga terus diperbaiki. Salah satu usaha pemerintah Indonesia memperbaiki mutu pendidikan yaitu dengan kebijakan Rintisan Sekolah Berstaraf Internasional/Sekolag Bertaraf Internasional (RSBI/SBI). Kebijakan ini sudah berjalan 6 tahun dan saat ini sedang menjadi perdebatan di mahkamah kontitusi, apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Masalah akses dan mutu pendidikan memang masih menjadi persoalan utama pada sektor ini. Akses pendidikan memperlihatkan bahwa masih banyak provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum tuntas wajib belajar. Perbaikan mutu yang hampir menjadi program setiap menteri yang duduk di Kementarian Nendidikan Nasional, tapi sampai sekarang persoalan tersebut belum tuntas. Mutu pendidikan belum terangkat dan duduk sejajar dengan negara-negara lain, paling tidak semestinya di Asia Tenggara atau Asia.

Kualitas pendidikan yang buruk memang merupakan bagian paling gelap dan membahayakan suatu bangsa. Dari zaman orde baru, bahkan sampai sekarang, institusi pendidikan sering difungsikan sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikendaki. Maka, kebijakan pendidikan pun sering tersandera oleh kepentingan penguasa.

KESIMPULAN

Tingkah laku para biokrat dalam memajemen sistem pendidikan masih buruk dan hal ini menjadi salah satu masalah serius dalam tatanan birokrasi terkait pandangan di mata publik. Tingkah laku birokrat yang terkesan apatis terhadap kewajibannya di dunia pendidikan mengakibatkan buramnya potret birokrasi pendidikan di Indonesia. Oleh karena, kinerja birokrasi melalui penanaman kesadaran dalam mengemban amanat negara harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima dalam merespon kepentingan publik. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dibutuhkan adanya birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Peningkatan kualitas birokrat pendidikan dan perbaikan sistem administrasi pendidikan menjadi prioritas mendesak yang harus disegerakan agar wajah birokrasi pendidikan menjadi lebih baik dimata public.

Strategi implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responbilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran eksploitasi dan kepentingan politis etis semata yang menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharighalib.wordpress.com/2008/07/28/*Birokrasi-Pendidikan-Ditinjau-Dari-Perspektif-Ontologi*.
- Fatmawati, E. (2019). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektf Peran Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat*. JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management, 1(1), 58-76.
- Lubis M & Scott J (1983). *Mafia dan Korupsi Birokrasi*, Jakarta::Yayasan Obor Indonesia.
- Nawawi, Z (2013). *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nurkolis (2013). *Potret Birokrasi Pendidikan Di Indonesia*, JMP, Volume 2 No.1
- Maria, D., et.al. (2018). Kesenjangan Birokrasi pendidikan Menuai Tanya Di Mata Publik. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 36-41.
- Rifai, M. (2011). *Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sarmila, S., et..al. (2021). *Peran Birokrasi Dalam Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan*. JURNAL MAPPESONA, 4(1).
- Savira, atl al (2014). *Kajian Strategi Reformasi Birokrasi Sektor Pendidkan*, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
- Slamet, P. H. (2014). *Politik pendidikan Indonesia dalam abad ke-21*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 33(3).
- Tilaar, (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirt & Kirst (1982). *The Politic of Education: Schools in Conflict*. Berkeley: McCutchan Publishing Corporation
- Zamroni, (2007). *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi Menuju Era Globalisasi)*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor.